

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Sejak krisis moneter yang menghantam perekonomian di negara-negara Asia pada saat era 1990-an, *Corporate Governance* mulai hangat dibicarakan dan munculnya inisiatif untuk menguatkan kerangka tata kelola perusahaan, baik di tingkat nasional maupun regional. Studi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)* mengidentifikasi bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya "tata kelola perusahaan" (Zhuang, *et al*, 2000). Dengan demikian, krisis Asia menjadi momentum penting yang mendorong reformasi tata kelola perusahaan di Asia, dan juga Indonesia.

Krisis yang melanda Asia tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia. Untuk itu dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri untuk merekomendasikan prinsip-prinsip GCG nasional. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (*public governance*). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006 (OJK Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, 2014).

Porter (1991) menyatakan bahwa alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin lebih disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya dapat juga mencakup strategi penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Struktur GCG dalam suatu perusahaan bisa jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. *Corporate governance* merupakan konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring atau supervisi yang menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nasution dan Setiawan, 2007). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004). Asimetri antara

manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998).

Menurut PSAK No. 1 Revisi 2013, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan, akan tetapi perhatian pengguna hanya ditujukan pada informasi laba saja. Hal tersebut yang menyebabkan laba menjadi sasaran manajemen dalam melakukan tindakan oportunistik dengan cara mengatur laba sesuai dengan keinginannya melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu (Subramanyan, 1996). Perilaku tindakan oportunistik juga disebabkan karena adanya kebebasan yang diberikan kepada masing-masing perusahaan dalam memilih salah satu dari berbagai alternatif prosedur dalam pelaporan keuangan (Priantinah, 2009). Tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen perusahaan adalah manajemen laba.

Menurut Theresia (2005) manajemen laba yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan adanya laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena dalam menjalankan kinerja perusahaan, manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan dimasa datang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Scott (2000) menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk suatu tujuan tertentu disebut dengan manajemen laba. Terkait dengan informasi laba, *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggung-jawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu para pengguna laporan keuangan dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan melakukan tindakan untuk memberikan laporan keuangan yang atraktif.

Manajemen yang ingin menunjukan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memanipulasi laporan keuangan agar bisa mencapai laba seperti yang diinginkan oleh pemilik. Laba adalah salah satu dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Dechow dalam (Siallagan dan Machfoedz,

2006), laporan yang dibuat oleh manajemen, mampu memberikan informasi terkait dengan kinerja perusahaan. Hal ini diprediksi dapat menimbulkan manipulasi laba yang sering diartikan sebagai manajemen laba. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Laba yang merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan (Parawiyati, 1996). Baik kreditur maupun investor, menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earnings power*, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. dan menurut Rachmawati (2013) manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) atau disebut dengan *agency conflict*. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik, namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Nabila dan Daljono (2013) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajemen dalam proses menyusun pelaporan keuangan yang dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya.

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan keuangan yang secara luas diketahui, yaitu antara lain PT Kimia Farma dan PT Inovasi Infracom (INVS) dan juga kasus yang Salah satu pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui adalah kasus Toshiba Corporation. Raksasa teknologi dan elektronik asal Jepang Toshiba Corp. penyebab kasus skandal tersebut adalah kurangnya penerapan *corporate governance*., sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektifitas penerapan *Good Corporate Governance*. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan dapat terjadi pada perusahaan yang kurang menerapkan atau lemahnya sistem *Good Corporate Governance* (Boediono, 2005).

PT Kimia Farma pada audit 2001, manajemen kimia farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada

unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan.

Kasus PT Inovasi Infracom pada tahun 2015. Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode september 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai asset tetap, laba bersih persaham, laporan segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp59 miliar. Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp1,45 triliun. Inovasi juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (<http://www.bareksa.com>, diposting pada: 25 Februari 2015).

Kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui adalah kasus Toshiba Corporation. Raksasa teknologi dan elektronik asal Jepang Toshiba Corp kemungkinan akan memasukkan kerugian bersih sebesar 10 miliar yen atau sekitar Rp1,17 triliun pada laporan keuangannya tahun 2014/2015. Harian *Yomiuri* melaporkan, kerugian itu dimasukkan berdasarkan hasil penyelidikan adanya kegiatan akuntansi yang tidak tepat di perusahaan tersebut. Dilansir dari *Reuters*, Kamis 3 September 2015 mengungkapkan, hasil dari penyelidikan yang dilakukan akuntan independen, Toshiba terbukti melebih-lebihkan keuntungan US\$12 miliar dolar selama beberapa tahun. Pada Senin lalu, Toshiba menunda pengumuman laporan keuangannya untuk yang kedua kalinya, karena adanya penemuan kesalahan perhitungan akuntansi baru. Perusahaan itu memiliki waktu hingga 7 September, jika tidak berisiko delisting dari bursa saham. Saham Toshiba naik 2,5 persen pada perdagangan hari ini, sementara di pasar lebih luas, TOPX, naik 1,9 persen. Melihat dari upaya yang dilakukan, ada kemungkinan perusahaan tersebut bisa melewati batas waktu yang ditentukan. Tidak tepatnya pembukuan Toshiba ini menjadi skandal

akutansi terbesar di Jepang sejak 2011 ketika Olympus Corp terungkap terlibat dalam menggelembungkan kerugian investasi sebesar US\$17 miliar. (Sumber: <http://bisnis.news.viva.co.id>).

Fenomena yang terjadi pada manajemen laba merupakan topik yang selama beberapa dekade terakhir ini sering muncul, baik itu dalam dunia akademik maupun bisnis. Peneliti telah menunjukkan bahwa manajemen laba semakin luas dan hampir ada dalam setiap laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Manajemen laba ini merupakan suatu permasalahan yang serius, karena rekayasa manajerial ini bisa merusak tatanan ekonomi, etika dan moral. Rekayasa manajerial menyebabkan publik meragukan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Praktek manajemen laba telah mengikis kepercayaan investor dalam kualitas pelaporan keuangan dan dapat menghambat kelancaran arus modal di pasar keuangan (Jackson dan Pitman, 2001). Akibat dari manajemen laba ini juga dapat mengurangi keandalan laba karena laba yang dilaporkan menjadi bias dan menyebabkan kesalah pahaman dalam menggambarkan laba yang sebenarnya (Rusmin, 2010). Menurut Sulistyanto (2008), terdapat beberapa faktor yang membuat rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam sebuah perusahaan : (1) Aturan dan standar akuntansi, transparansi dan auditing yang masih lemah, (2) Sistem pengawasan dan pengendalian perusahaan yang belum optimal, (3) Terdapat adanya *moral hazard*, manajer perusahaan yang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya.

*Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.1, menyebutkan bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dari laporan keuangan dalam mengetahui kinerja manajemen. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya. Tindakan-tindakan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri (*opportunistic*) dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur dengan cara dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (Nuryaman, 2008). Laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi perusahaan, karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Jatiningrum, 2000). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal dalam hal ini adalah manajemen perusahaan yang berkewajiban menyusun laporan keuangan. Pihak eksternal

adalah pemegang saham, pemerintah dan kreditur yang sangat memerlukan informasi keuangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal, memberikan pinjaman serta untuk memperoleh dana pembangunan dalam bentuk pajak (Jin dan Machfoedz, 1998).

Perusahaan yang ingin mengurangi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan yaitu dengan mewujudkannya sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen antara lain dengan (1) memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976); (2) kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan *earnings management* (Pratana dan Machfoedz, 2003); (3) proporsi dewan komisaris independen yang membatasi pihak manajemen untuk melakukan *earning management* (Peasnell, Pope dan Young, 1998), (4) keberadaan komite audit yang dapat mengurangi aktivitas *earnings management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba (Wilopo, 2004). Penerapan prinsip *Good Corporate Governace* diharapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari penurunan *earning management*.

Dengan penerapan *good corporate governance* secara konsisten yang berprinsip pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya prinsip *good corporate governance* tersebut diharapkan dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan dilakukannya penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini karena adanya tindakan manajer dalam memainkan laporan keuangan perusahaan atas kepentingannya sendiri. Seperti yang terjadi pada beberapa kasus diatas yang terjadi pada perusahaan manufaktur yaitu terjadinya mark up laba atau penggelembungan laporan keuangan serta manipulasi laporan keuangan perusahaan. dan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual, dan didalam proses tersebut melibatkan banyak transaksi transaksi akuntansi sehingga besar kemungkinan terjadinya kecurangan, dan perusahaan manufaktur sudah menjadi perusahaan *go-publik*, dengan produk-produknya yang sudah

banyak dikenal oleh masyarakat luas serta perusahaan yang sudah banyak *listing* di BEI dan selain itu perusahaan dengan kompleksitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “ **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA** “



## 1.2 Rumusan masalah

Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajer yang tidak menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang berlaku secara umum dalam melakukan manajemen laba.

## 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana cara mengurangi kecurangan manajemen laba yang tidak memenuhi prosedur akuntansi yang berlaku secara umum pada perusahaan.

## 1.4 Pertanyaan penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah pengaruh proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

## 1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan analisa sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh hubungan Kepemilikan Konstitusional terhadap Manajemen Laba.
3. Untuk mengetahui pengaruh hubungan Proporsi dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba.
4. Untuk mengetahui pengaruh hubungan Komite Audit terhadap Manajemen Laba.

## 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba.
2. Dapat memberikan kontribusi bagi literatur mengenai mekanisme *corporate governance* yang berbasis pada teori keagenan.



3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah khasanah baca bagi mahasiswa.

